



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA

**PERANAN PEMUKA MASYARAKAT UNTUK MENDORONG
PARTISIPASI ANGGOTA P3A DALAM PENGELOLAAN
AIR IRIGASI (Studi Kasus di Daerah Irigasi
Air Majunto, Bengkulu Utara)**

Oleh :

**Ir. Yusril Dani, MP.
Ir. Meizul Zuki, MS.**

**DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN
NOMOR : 022 / SPPP / PP / DP3M / IV / 2005
TANGGAL 11 APRIL 2005**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU
2005**



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA

**PERANAN PEMUKA MASYARAKAT UNTUK MENDORONG
PARTISIPASI ANGGOTA P3A DALAM PENGELOLAAN
AIR IRIGASI (Studi Kasus di Daerah Irigasi
Air Majunto, Bengkulu Utara)**

Oleh :

**Ir. Yusril Dani, MP.
Ir. Meizul Zuki, MS.**

**DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN
NOMOR : 022 / SPPP / PP / DP3M / IV / 2005
TANGGAL 11 APRIL 2005**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU
2005**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1. a. Judul Penelitian : Peranan Pemuka Masyarakat Untuk Mendorong Partisipasi Anggota P3A Dalam Pengelolaan Aire Irigasi.
(Studi Kasus di D.I. Air Manjuntio Muko-muko)

b. Kategori Penelitian : Penunjang Pembangunan

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Yusril Dany, MP
b. Jenis kelamin : L
c. Pangkat/Golongan/NIP : Penata/IIIc/131660016
d. Jabatan fungsional : Lektor
e. Fakultas/Jurusan : Pertanian/Budidaya Pertanian
f. Universitas : Bengkulu
g. Bidang ilmu yang diteliti : Pengembangan Wilayah Pedesaan

3. Jumlah tim Peneliti : 2 (dua) orang

4. Lokasi Penelitian : Daerah Irigasi Air Manjuntio , Kab. Muko-muko

5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan:

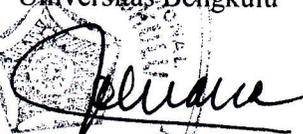
a. Nama Instansi : Tidak ada
b. Alamat : Tidak ada

6. Jangka waktu penelitian : 8 bulan

7. Biaya yang diperlukan : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

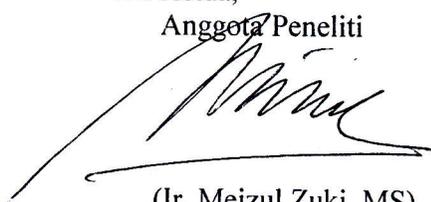
Bengkulu, 16 November 2005

Mengetahui
Dekan Fak. Pertanian
Universitas Bengkulu



(Dr. Ir. Yurwana, MSc.)
NIP. 131 627 052

a/n Ketua,
Anggota Peneliti



(Ir. Meizul Zuki, MS)
NIP. 131 630 068

Mengetahui;
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Bengkulu



(Syaiful Anwar A.B., SU)
NIP. 131 414 019

PERANAN PEMUKA MASYARAKAT UNTUK MENDORONG PARTISIPASI ANGGOTA P3A DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Studi Kasus di Daerah Irigasi Air Manjuntio Muko-muko

(Yusril Dany dan Meizul Zuki, tahun 2005, 32 halaman)

RINGKASAN

Sepanjang perjalanan Indonesia merdeka, pangan selalu menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Di Indonesia pangan identik dengan beras. Sebetulnya pemerintah tanggap dengan hal ini. Program intensifikasi dan ekstensifikasi dijalankan secara bersama-sama. Jaringan irigasi, dengan biaya yang sangat besar, dibangun dan diperbaiki untuk menunjang program tersebut.

Sadar akan keterbatasan dana dan sumberdaya manusia, pemerintah meminta kesediaan petani pemakai air untuk menanggung biaya pembangunan dan pengelolaan air irigasi. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan suatu lembaga di pedesaan yang berkaitan dengan pengelolaan air irigasi. Sayangnya kinerja lembaga ini masih rendah, sementara produktivitas padi sawah mesti terus ditingkatkan. Nampaknya perlu dorongan untuk optimalisasi kinerja P3A. Pemuka masyarakat merupakan potensi lokal yang memiliki ikatan emosional dengan masyarakatnya. Tokoh ini juga memiliki legitimasi secara sosial dari masyarakat sebagai pemimpin non-formal sehingga secara otomatis dapat mempengaruhi tingkah laku dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran pemuka masyarakat untuk mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi. Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Irigasi Air Manjuntio di Kecamatan Muko-muko Utara, Kabupaten Muko-muko. Dua desa (Tanjung Alai dan Tirta Makmur) dijadikan tempat penelitian. Di kedua desa itu terdapat empat kelompok P3A, yaitu Renah Pematang Gedang dan Kesma Tirta Mulya di desa Tanjung Alai sedangkan Jaya Makmur dan Memayu Among Tani di Desa Tirta Makmur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Pengumpulan data dan pengamatan berperan serta wawancara

dilakukan dengan pemuka masyarakat dan pengurus P3A serta berbagai pihak yang terkait dalam pembinaan P3A di daerah penelitian. Pengujian keabsahan data digunakan teknik triangulasi terutama triangulasi sumber dan metode. Data kualitatif dan kuantitatif dianalisis dengan menggunakan penjelasan kualitatif.

Temuan penelitian menunjukkan peranan pemuka masyarakat dapat mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi. Namun demikian, efektivitas dari peranan pemuka masyarakat juga tergantung pada komponen-komponen lain yang menyusun system irigasi, terutama komponen teknis irigasi serta aspek lain diluar system irigasi, seperti masalah agribisnis. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kelompok pemuka masyarakat yang dominan dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi. Juga tidak ditemukan adanya hubungan antara luasan pemilikan lahan padi sawah dengan keberperanan pemuka masyarakat dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi.

JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU

DIBIYAI PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN
TERAPAN DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: 022/SPPP/PP/DP3M/IV/2005
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PRAKATA

Dengan menyampaikan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, laporan penelitian ini telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan dari penelitian yang berjudul “ Peranan pemuka masyarakat untuk mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi” ini, merupakan suatu penelitian dalam bidang Pengembangan Wilayah Pedesaan.

Di Desa penting untuk diperhatikan faktor-faktor penentu upaya keberhasilan pembangunan di pedesaan itu sendiri. Pemuka masyarakat merupakan tokoh informal yang dalam berbagai peristiwa sering menunjukkan kompetensinya.

Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Irigasi (D.I) Air Manjuntjo, Kecamatan Muko-muko Utara, Kabupaten Muko-Muko. Kabupaten Muko-muko merupakan kabupaten pemekaran yang sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi penelitian dilewati oleh jalur barat Lintas Sumatera (transportasi darat). Dengan demikian, tidak heran, daerah penelitian tidak hanya dihuni oleh penduduk lokal, akan tetapi juga pendatang dan warga transmigrasi.

Untuk dapat terlaksananya penelitian beserta penyusunan laporan ini, banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

- a. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional selaku penyandang dana penelitian.
- b. Bapak Busra SPd. (Mantan KUA Lubuk Pinang) beserta keluarga yang telah melapangkan jalan penulis untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Pengurus P3A Jaya Makmur, Memayu Among Tani, Kesma Tirta Mulya, dan Renah Pematang Gedang beserta Pemuka Masyarakatnya.
- d. Instansi terkait yang ada di kecamatan Muko-muko Utara

Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam laporan ini dapat bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LERMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
PRAKATA	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
BAB IV. METODE PENELITIAN	15
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Keadaan P3A yang aktif dan kurang aktif.....	15
2.	Kondisi P3A daerah penelitian dari segi organisasi	21
3.	Struktur organisasi P3A Memayu A. Tani	22
4.	Struktur organisasi P3A Kesma T. Mulya	22
5.	Struktur organisasi P3A Jaya makmur	22
6.	Pembentukan kepengurusan dan keterlibatan pemuka masyarakat	23
7.	Pemuka Masyarakat P3A Jaya makmur	24
8.	Pemuka Masyarakat Renah P. Gedang	25
9.	Pemuka Masyarakat Memayu A. Tani	25
10.	Pemuka Masyarakat Kesma T. Mulya	25
11.	Pemuka Masyarakat P3A Jaya Makmur dan latar belakang pekerjaannya ...	27
12.	Luas sawah Pemuka Masyarakat P3A Jaya Makmur	29

SUMMARY

As long as the distance of Indonesian independence, food always becomes problem that not never finish. In Indonesia, food equivalent to rice. Actually, govermence response with this problem. Intensification and extensification programs were conducted together. Irrigatin network, with high cost, were constructed and repaired for supporting that programs.

Because of limiting fund and humand resource, govermence hoped farmer (water user) pay the cost of construting and irrigation water management. Water user assosiatin (P3A) is the institution that take place in village that telated to irrigation water management. Unfortunately, performance of this institution is still low. , otherwise productivity of rice must keep on increasing. Stimulation has to give to P3A assosiaton in ordet to find better performance. Informal leader is local capability thah have emotional relation with their public. These leader also have social legitimation from public as as informal leader.. So, automatically bean influence public behavior for participating in development.

The goal of this research is to see so far the act of informal leader for stimulating partisipantion of P3A person. In irrigatin water management. This research were conducted in air Manjunto irrigation area in Muko-muko residence. Two villages (Tanjung Alai and Tirta Mulya) becomes the place of researce. In these villages there were four P3A, i.e Remah Pematang Gedang and Kesma Tirta Mulya in Tanjung Alai Village and Jaya Makmur and Memayu Among Tani in Tirta Makmur village.

Method that used in this research is descriptive method with qualitative explanation. Collecting data, partisipative observation and interview were conducted with informal leader, person of P3A institutrition and other institution that related to building of P3A in research area. Test of data validation by using triangulation technique, specially triangulation resource and method. Qualitative and quantitative data was analysed by using qualitative explanation.

Resoult of this research showed that the act of informal leader can stimulated partisipation of P3A analysed by using qualitative explanation.

Resoult of this research showed that the act of informal leader can stimulated partisipation of P3A person in irrigation water management.. But, the efectivity of the act

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sepanjang perjalanan Indonesia merdeka, pangan selalu menjadi perbincangan yang tidak pernah selesai. Peningkatan jumlah penduduk berlomba dengan peningkatan produksi pangan. Rendahnya difersifikasi, pangan menjadi identik dengan beras. Naik turunnya harga beras berdampak luas, seperti masalah sosial, ekonomi, kesehatan dan politik.

Sebetulnya pemerintah tanggap dengan masalah ini. Pada masa Orde Baru, peningkatan produksi beras menjadi prioritas. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi dijalankan bersama-sama. Untuk masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia yang sangat membutuhkan makanan, revolusi hijau ketika itu muncul sebagai penyelamat dan mampu menaikkan produksi beras secara signifikan. Pada tahun 1984 Indonesia mampu berswasembada beras dan mendapat penghargaan dari FAO.

Padi sawah adalah penghasil beras utama. Dibandingkan dengan tanaman lain, padi sawah pengguna air terbesar. Kala itu, untuk menjamin tersedianya air irigasi yang cukup dan terkontrol pemerintah membangun dan memperbaiki sistem irigasi secara besar-besaran dengan biaya yang sangat mahal.

Sadar akan keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang dimiliki, pemerintah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi. Salah satu dari peraturan tersebut yang memperlihatkan keterbatasan pemerintah adalah PP No. 23 tahun 1982 Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Eksplorasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya dari irigasi desa, irigasi subak serta irigasi dalam petak tersier menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat tani pemakai air".

Peraturan Pemerintah tersebut mengilhami terbentuknya suatu kelembagaan di pedesaan yang berkaitan dengan pengelolaan air. Kelembagaan ini diberi nama P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). Helmi (1992) mengatakan bahwa ketika kemampuan pemerintah sudah terbatas untuk menanggung biaya pembangunan dan pengelolaan irigasi, ketika upaya untuk berswasembada beras harus terus digalakkan dan ketika

informal leader also depend on other components in structure of irrigation system, especially irrigation technique and other aspect besides irrigation system, like "agribisnis". In this research is not found domination of informal leader group in stimulating partisipation of P3A person in irrigation water management. So, There is not found the relation between quantity of rice land possession with act of informal leader in stimulating partisipation of P3A Person.

produktivitas petani padi sawah terus diupayakan untuk ditingkatkan, maka keberlanjutan (*sustainability*) sistem irigasi menjadi fokus perhatian. Lebih lanjut ditambahkan bahwa kelembagaan adalah kunci bagi terjadinya keberlanjutan (Svensend, 1987).

Sayangnya, kelembagaan P3A yang ada kinerjanya masih rendah. Kesadaran dan keinginan Petani untuk menanggulangi secara bersama kebutuhan akan air belum begitu tinggi sedangkan ketergantungan akan air sangat besar sekali terutama untuk tanaman padi sawah (Yusril dany, 2000). Terjadinya penyimpangan cuaca akhir-akhir ini berupa banjir dan kekeringan cenderung akan ikut menekan kinerja kelembagaan P3A. Ruang semakin terbuka untuk munculnya konflik sosial diantara sesama pamakai air irigasi. Runtutannya berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat pedesaan di tingkat lokal dan pasokan beras dari dalam negeri secara nasional.

Nampaknya diperlukan dorongan untuk optimalisasi kinerja P3A. Selama ini dominasi intervensi pemerintah terhadap kelembagan masyarakat sangat kuat. Yusril dany (2000) menemukan bahwa P3A bentukan pemerintah cenderung menimbulkan ketergantungan dan pelaksanaan tugas menjadi berdasarkan instruksi pemerintah semata.

Pola *top-down* sudah ketinggalan zaman dengan segala akibat negatif yang ditinggalkannya. Pola *bottom-up* dengan pengerahan kompetensi lokal menjadi pilihan dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi. Pemuka masyarakat merupakan potensi lokal yang dalam berbagai peristiwa memperlihatkan kemampuannya dalam menangani berbagai konflik. Pemuka masyarakat adalah kelompok masyarakat tertentu yang memiliki ikatan emosional dengan masyarakat di daerahnya. Meizul Zuki (1993) memanfaatkan “kelebihan” pemuka masyarakat untuk suksesnya kegiatan pengabdian pada masyarakat.

✓ T. Sondakh dkk. (1991) mengatakan bahwa tokoh masyarakat adalah kelompok masyarakat yang timbul dari, oleh dan untuk masyarakat. Tokoh ini memiliki legitimasi secara sosial dari masyarakat sebagai pemimpin non-formal sehingga secara otomatis dapat mempengaruhi tingkah laku dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Disamping itu, tokoh masyarakat dapat bertindak juga sebagai pengemban demokrasi pembangunan di pedesaan dan sebagai artikulator aspirasi-aspirasi masyarakat di pedesaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, dimana disatu sisi kelembagaan P3A merupakan kunci dari keberlanjutan system irigasi sedangkan disisi lain ditemukan fakta bahwa kinerja P3A masih rendah dan bersandarkannya P3A pada pemerintah justru menimbulkan ketergantungan, maka pemuka masyarakat dapat dijadikan pilihan untuk mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi.

Jatuhnya pilihan pada pemuka masyarakat untuk mendorong partisipasi anggota P3A menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pemecahan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

1. Apakah peranan pemuka masyarakat dapat mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi ?
2. Kelompok pemuka masyarakat mana yang paling pas untuk mendorong partisipasi anggota P3A tersebut ?
3. Apakah peranan pemuka masyarakat dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi ada hubungannya dengan luasan pemilikan lahan padi sawah mereka ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Peran atau peranan merupakan suatu istilah. Peran dapat diartikan sebagai seperangkat pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu satuan sosial (Stephen P. Robbins, 1996). Pada kesempatan lain Grosss, Mason dan McEachern (1958) dalam David Berry (1981) mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya: kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan kita.

David Berry (1981) menjelaskan bahwa pertama-tama penting untuk menanyakan bagaimana “masyarakat” menentukan harapan-harapannya terhadap pemegang – pemegang peran. Dengan mengikuti Dahendorf (1968) dapatlah dikatakan bahwa harapan-harapan di dalam peranan (*role expectation*) adalah berasal dari norma-norma sosial dengan melalui “*normative reference group*”nya. Kelompok referensi dari individu adalah kelompok-kelompok yang dianggap sebagai “*generalized others*”, yang mengarahkan pandangan individu dalam merumuskan situasi dimana ia berada. *Normative reference groups* adalah kelompok referensi dari mana individu mengambil norma-norma yang mengatur tingkah lakunya dan dari kelompok referensi ini pula si individu menemukan “harapan” tentang apa yang seharusnya ia lakukan sehubungan dengan peranan-peranannya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam peranan yang ia pegang.

1.1 Pemuka Masyarakat Desa

Janssen (1983) mengatakan golongan-golongan terpenting yang dijumpai dalam desa adalah golongan-golongan fungsional, golongan-golongan menurut umur dan kelamin serta golongan-golongan menurut keturunan. Kadang-kadang terdapatlah golongan-golongan yang sedikit banyaknya mempunyai kedudukan istimewa, karena disegani sebagai keturunan para cikal bakal dan para gogol yang asli. Golongan-golongan

tradisional demikian harus diajak pula untuk bersama-sama menghadapi tantangan zaman modern. Diantara golongan-golongan fungsional terdapatlah:

- a. Pemerintahan
Pemerintah di desa dijalankan oleh Pamong desa, ialah kepala Desa dan perangkat-perangkatnya.
- b. Organisasi-organisasi keamanan
Dekat dengan golongan pemerintahan adalah organisasi-organisasi keamanan, seperti Hansip dan lain-lain.
- c. Para penghantar agama
Para penghantar agama ini dibutuhkan oleh masyarakat, seperti alim-ulama, kyai, pendeta, guru agama dan lain-lain yang sejenis.
- d. Pegawai-pegawai lain
Pegawai-pegawai pada umumnya berasal dari jawatan-jawatan yang ada di desa.
- e. Para guru
Mereka adalah orang yang berjasa di bidang pendidikan
- f. Para pengusaha
Mereka adalah kelompok masyarakat desa yang pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan, industri dan pengangkutan
- g. Penghuni dari luar
Mereka adalah kelompok masyarakat luar yang memiliki sebuah rumah atau tempat peristirahatan di desa
- h. Para Petani
Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang terbesar kedua di desa. Para Petani ini dapat pula dikategorikan atas status kepemilikan lahan.
- i. Kaum buruh
Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang terbesar di desa
- j. Para sesepuh
Kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang sudah tidak bekerja lagi. Diantara mereka terdapat orang-orang yang disegani karena pengetahuan mereka tentang adat-istiadat dan riwayat desa, karena sikap dan kelakuan mereka yang

arif bijaksana, karena pengetahuan mereka tentang ilmu ghaib dan karena alasan-alasan lain lagi.

k. Kaum wanita

Di dalam golongan-golongan yang tersebut di atas sudah dengan sendirinya terdapat bukan sedikit kaum wanita, misalnya diantara pedagang di pasar dan pemilik toko maupun warung-warung.

l. Golongan pemuda/pemudi

Orang muda mempunyai cita-cita tinggi dan gaya hidup yang masih kuat

m. Golongan-golongan keturunan

Kadang-kadang terdapat di dalam desa orang-orang yang berasal dari berbagai suku atau keturunan yang harus diintegrasikan dalam pembangunan masyarakat.

↓ Sumuntarsih, dkk (1992) mengatakan kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang timbul dari adanya unsur kekayaan, pendidikan keagamaan ataupun keturunan. Jenis kepemimpinan ini muncul karena adanya kepentingan baru baik dalam bidang agama, pendidikan, politik dan sebagainya. Biasanya peranannya pada wilayah yang tak terbatas, mungkin juga sampai pada luar daerah lingkungannya. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan pemimpin informal ini maka orientasi kegiatan biasanya mengenai masalah keagamaan dan pendidikan. Demikian pula yang ada di daerah penelitian ini (Yogyakarta). Pada kenyataannya pemimpin informal yang muncul disini merupakan pioner pembaharu, walaupun dapat dikatakan hanya pada tingkat pedukuhan/kelurahan, tetapi cukup membawa kemajuan. Kiranya potensi seperti inilah yang perlu diperhatikan untuk mengintegrasikannya ke dalam program-program pemerintah.

Karena lahir dari masyarakat sendiri, maka pemimpin tipe ini tidak mempunyai hak dan kewajiban yang pasti menurut hukum formal. Pemimpin informal ini tidak mempunyai jabatan resmi, dilain pihak dia juga tidak mempunyai atribut dan tidak pernah diangkat. Hanya pada saat-saat tertentu dalam lingkungan masyarakatnya dia muncul sebagai penasehat. Atas dasar pengaruh, kewibawaan ataupun factor-faktor lain ia berfungsi di lingkungan masyarakatnya. Pemimpin-pemimpin informal biasanya terdiri dari orang-orang terkemuka dan berpengaruh di masyarakat. Mereka ini dapat berasal dari golongan tua-tua yang berpengaruh dalam masyarakat, pemimpin organisasi, seorang

pengusaha atau mungkin ulama. Pada suatu masyarakat yang sebagian besar pemeluk agama Islam yang taat, kepemimpinan yang muncul adalah seorang ulama atau kyai. Jadi dapatlah dikatakan bahwa munculnya kepemimpinan informal dalam suatu masyarakat adalah disebabkan karena beberapa factor, yaitu; kondisi masyarakat itu sendiri, situasi dan adanya kekhususan masyarakat yang bersangkutan. Kondisi masyarakat dapat memungkinkan munculnya tipe kepemimpinan ini, karena masyarakat membutuhkan kehadirannya dan muncullah orang yang mengerti kebutuhan dan kemauan masyarakat pada saat itu. Kemudian situasi masyarakat juga memungkinkan munculnya pemimpin tipe ini; misalnya pada suatu waktu timbul ketegangan/ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu masalah, pemimpin tipe ini dapat merupakan pendorong bagi timbulnya ketegangan ini. Selanjutnya kekhususan lingkungan masyarakat nampaknya memberikan corak tersendiri bagi kemunculan pemimpin tipe ini. Pada masyarakat feodal misalnya, orang yang kaya atau keturunan bangsawan dianggap sebagai pemimpin. Pada masyarakat Islam, maka para kyai, ulama dan guru agama adalah pemimpin tidak resmi dalam lingkungannya.

Secara umum terdapat batas yang tegas antara peranan pemimpin formal tradisional (pamong desa – khususnya lurah) dengan pemimpin informal dalam masyarakat pedesaan seperti disebutkan oleh Kana (1973:73) bahwa ada kecenderungan para tokoh masyarakat lebih menampakkan inisiatif untuk kegiatan-kegiatan yang berasal dari dalam desa sendiri atau yang potensinya terdapat di desa atau paling sedikit menyalurkan pengaruhnya untuk kegiatan-kegiatan pamong desa, sedangkan para pamong lurah lebih bergiat dalam realisasi program-program instruktif dari atas. Oleh sebab itu, maka dalam hubungannya dengan proyek/program dari atas, pemimpin informal sering dijadikan semacam kunci guna keberhasilan program atau proyek tersebut. Namun demikian munculnya pemimpin tipe ini seringkali dapat pula menimbulkan pertentangan-pertentangan dengan pemimpin-pemimpin formal. Dalam lingkungan masyarakatnya, pemimpin informal sering bersaing dengan pemimpin formal. Maka kebijaksanaan yang digunakan agar suatu pembangunan desa dapat berhasil adalah memanfaatkan potensi pemimpin tipe informal ini.

Masalah kepemimpinan dalam hal ini adalah adanya kerjasama antara para tokoh/pemimpin dari berbagai golongan masyarakat baik formal maupun informal.

Dengan keterlibatan para pemimpin informal dalam proses pembangunan, maka setidaknya dapat diketahui dan ditentukan pola pembangunan yang dikehendaki rakyat yang sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Mengikutsertakan rakyat dalam pembangunan daerah dapat merangsang rakyat untuk ikut melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan. Aspirasi rakyat tersebut dapat terwujud apabila lembaga-lembaga yang ada di desa dapat menampung aspirasi dan potensi masyarakat. Kemudian aspirasi tersebut diselaraskan dengan program-program pembangunan nasional. Untuk itu dedikasi dan prestasi para pemimpin pembangunan perlu mendapat perhatian.

Pada beberapa kasus pembangunan di pedesaan, program-program pembangunan yang berasal dari atas nampaknya ada yang tanpa sepengetahuan atau kompromi-kompromi dengan pemimpin-pemimpin setempat. Sehingga dalam pelaksanaannya tak jarang mendapat hambatan. Disamping itu juga disebabkan belum dimanfaatkannya potensi-potensi desa yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat maupun organisasi-organisasi sosial yang ada dalam setiap proses pembangunan. Dengan melibatkan mereka ini diharapkan hambatan-hambatan itu dapat diatasi.

2.2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah salah satu lembaga atau organisasi yang ada dalam masyarakat petani di pedesaan yang bertujuan mengatur dan memelihara jaringan irigasi untuk keperluan pertanian. Peran kelembagaan petani sebagai faktor penting dalam peningkatan produksi dan pemerataan pendapatan tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, baik pemerintah Indonesia maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat sekarang semakin memperhatikan fungsi dan peranan P3A dalam usaha pengelolaan air irigasi (Pasandaran, 1991). Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) memiliki istilah lain, yaitu Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A).

Tugas, fungsi dan peran organisasi Petani yang memungkinkan kesepakatan sosial itu dapat dilihat dengan sebuah kerangka konseptual. Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengelola air irigasi dengan baik dapat dibedakan dalam tiga kategori besar, yaitu: kegiatan kelembagaan, bangunan kontrol air dan penggunaan air (Achmadi, 1986).

Ambler (1991) mengatakan apabila Petani dibagian hulu tidak membersihkan saluran, air mungkin tidak sampai ke petani bagian hilir, atau apabila salah satu petani

adalah bagian yang integral yang tidak bias dilepaskan dari kehidupan desa yang memang agraris.

2.3. Pengelolaan air irigasi

Air merupakan kebutuhan pokok bagi tanaman padi sawah. Akan tetapi pemakaian air yang berlebihan atau terjadi kekurangan air dapat menurunkan produksi tanaman padi sawah. Keberadaan sistem irigasi adalah dalam upaya mengeliminir dampak negatif dari kekurangan dan kelebihan air tersebut.

Pusposutardjo (1989) mengatakan kinerja sistem irigasi sangat tergantung pada cara eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pengelolaan air. Dengan demikian kinerja sistem irigasi akan ditentukan oleh empat komponen pokok, yaitu a) fisik jaringan irigasi, b) kemampuan pengoperasian jaringan oleh petugas pengairan, c. ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang mengikat pengoperasian dan pemanfaatan dan d) Petani pemakai air.

Optimalnya pelaksanaan keempat komponen tersebut dapat meningkatkan kinerja sistem irigasi sehingga air dapat tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan waktu dibutuhkan. Keadaan ini dapat mengefektifkan penggunaan teknologi yang lebih baik, yaitu varietas unggul yang berdaya hasil tinggi berumur pendek, pupuk kimia dan pestisida sehingga menunjang program supra intensifikasi khusus. Sebaliknya, bila diantara keempat komponen sistem irigasi tidak dapat terlaksana sesuai dengan semestinya, maka kinerja sistem irigasi jadi berkurang. Air tidak dapat tersedia dengan baik dan pada akhirnya tidak dapat menunjang supra intensifikasi khusus dengan baik (Meizul Zuki, 1993). Bagan alir model upaya perbaikan kinerja system irigasi dalam menunjang pelaksanaan program intensifikasi khusus dapat dilihat pada Gambar 1.

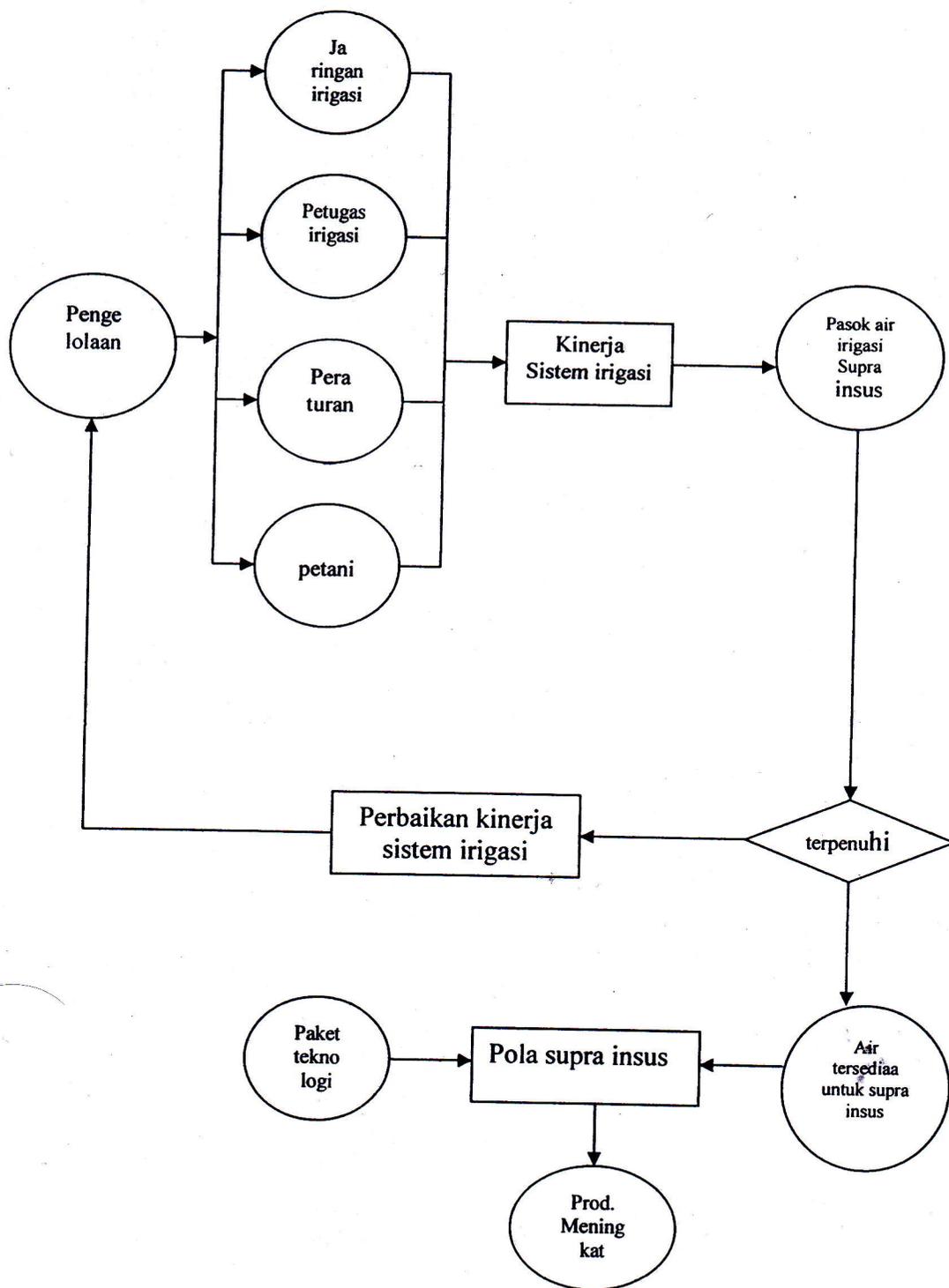
Pusposutardjo (1989) mengatakan bahwa dari keempat komponen penyusun sistem irigasi, komponen peran serta Petani pemakai air sangat menonjol karena empat hal, yaitu:

- a. Pembangunan irigasi merupakan satu kesatuan dalam pembangunan pengairan yang sifatnya selain meningkatkan kemampuan penyediaan air juga berusaha mengembangkan, mengatur dan menjaga kelestarian sumber air.

- b. Diperlukan dorongan terhadap masyarakat tani untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia terutama untuk pengembangan persawahan dan intensifikasi dan penggunaannya.
- c. Diperlukan adanya peran serta petani dalam pengembangan jaringan terminal (jaringan tersier maupun kuarter) seperti tertuang di dalam PPRI No. 23 tahun 1082.
- d. Diperlukan peningkatan kesadaran, kemampuan petani dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan, perawatan dan pendayagunaan sarana irigasi yang ada dengan diikuti pengaturan air secara efisien.

Berkenan dengan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, Diana Concers (1984) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan setempat begitu penting dengan alasan:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal.
- b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
- c. Mendorong adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
- d. bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.



Gambar 1. Bagan alir model upaya perbaikan kinerja system irigasi dalam menunjang pelaksanaan program supra intensifikasi khusus (Meizul Zuiki, 1993).

Dalam konteks manajemen kaitannya dengan perilaku dalam organisasi Keith David dan John W. Newstrom (1993) mengatakan seorang manajer yang partisipatif berkonsultasi dengan pegawai mereka, melibatkan mereka dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sehingga mereka bekerja sama sebagai sebuah tim. Disini, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Keith David dan John W. Newstrom (1993) bahwa ada tiga gagasan penting dalam definisi partisipasi, yaitu; keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab. Akan tetapi yang lebih utama adalah keterlibatan mental dan emosional. Partisipasi disini berarti keterlibatan mental dan emosional ketimbang hanya berupa aktivitas fisik. "Diri" orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya ketrampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi "terlibat egonya" ketimbang hanya "terlibat tugas".

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah peranan pemuka masyarakat dapat mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi ?
2. Kelompok pemuka masyarakat mana yang paling pas untuk mendorong partisipasi anggota P3A tersebut ?
3. Untuk mengetahui apakah peranan pemuka masyarakat dalam mendorong anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi ada hubungannya dengan luasan pemilikan lahan padi sawah mereka ?

3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penetapan atau perumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penentu kebijaksanaan dalam pengelolaan air irigasi dalam:
 - a. Bentuk gambaran dan sosok pemuka masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat (anggota P3A) dalam mengelola air irigasi.
 - b. Melihat kelompok pemuka masyarakat mana yang paling pas dijadikan pendorong partisipasi masyarakat (anggota P3A) dalam mengelola air irigasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk mencari model pengelolaan air irigasi yang berbasis kompetensi dan pemberdayaan masyarakat lokal khususnya pemuka masyarakat.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

a. Sasaran Penelitian

Penelitian ini mengambil kasus di D.I. Air Manjuntio yang terletak di kecamatan Muko-muko Utara, Kabupaten Muko-muko, Provinsi Bengkulu.

b. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemuka masyarakat yang ada di daerah penelitian. Unit analisis penelitian adalah D.I. Air Manjuntio yang ada dalam kecamatan Muko-muko Utara, Kabupaten Muko-muko,.

Pengambilan sampel menggunakan cara yang dianjurkan oleh Muhajir (1991), yaitu sampel berjenjang ganda yang dilaksanakan dalam beberapa tahap.

Tahap pertama: di sampel areanya; dari sekian banyak D.I di Provinsi Bengkulu, dipilih D.I. Air Manjuntio secara purposif dengan alasan D.I. Air Manjuntio adalah daerah irigasi yang berada di Kab. Muko-muko yang mempunyai 76 kelompok P3A sehingga memudahkan memperoleh data yang lengkap.

Tahap kedua: di sampel satuan kelompoknya dari 76 P3A di D.I. Air Manjuntio dipilih secara sengaja 4 (empat) P3A yang terdiri dari dua kelompok yang aktif dan dua pula kelompok yang tidak aktif. Peranan pemuka masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dilihat pada ke-empat P3A ini. Yusril Dany (2000) melaporkan ke-empat P3A itu adalah seperti diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keadaan P3A yang aktif dan kurang aktif

No.	Desa	Nama P3A	Luas (Ha)	AD/ART	Kegiatan
1.	Tirta Makmur	Jaya Makmur	65	ada	Aktif
2.	Tirta Makmur	Memayu A. Tani	60	Belum	Kurang
3.	Tanjung Alai	Renah P. Gedang	60	ada	Aktif
4.	Tanjung Alai	Kesma T. Mulya	78	ada	kurang

Sumber: Ranting Dinas P.U. Pengairan Muko-muko Utara Cabang Dinas P.U

Pengairan Bengkulu

Tahap ketiga: di sampel responden; dari seluruh pemuka masyarakat pada keempat P3A dipilih P3A Jaya Makmur sebagai kelompok P3A yang aktif dan P3A Memayu Among Tani sebagai kelompok yang kurang aktif.

Data yang diperlukan:

- a. Aktivitas P3A
- b. Keterlibatan pemuka masyarakat pada aktivitas P3A
- c. Keterlibatan pemerintah pada aktivitas P3A
- d. Luas pemilikan lahan pemuka masyarakat
- e. Golongan pemuka masyarakat (kaum Ulama, Cendikiawan, Bangsawan dan elit ekonomi)

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah semua informasi hasil wawancara langsung dengan responden di lapangan. Sedangkan data sekunder berupa catatan, laporan dan informasi tertulis yang terkait dengan tujuan penelitian ini diperoleh dari instansi terkait.

Pencatatan sumber data utama dilakukan dengan wawancara dan pengamatan berperan serta (Koencaraningrat, 1994 dan Moleong, 1996) yang merupakan usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Jadi sumber data utama diperoleh melalui pengamatan berperanserta dengan pemuka masyarakat.

Teknik dan proses pengumpulan data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik pengamatan berperan serta. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1996), mendefinisikan pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang mencirikan interaksi social yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek penelitian dimana semua data berbentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis. Jadi peneliti turut terlibat dalam kehidupan sehari-hari pemuka masyarakat yang diteliti dalam kurun waktu tiga bulan, mengamati berbagai peristiwa yang terjadi, mendengar secara cermat apa yang dikatakan dan yang dilakukan pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan dan mendeskripsikan dalam suatu pemahaman sesuai dengan focus penelitian.

Pengamatan berperan serta dilakukan dengan jalan tinggal dan bermukim di wilayah penelitian yang bertujuan mengamati peranan pemuka masyarakat di tengah-tengah masyarakat petani pemakai air.

Metode yang digunakan

Berdasarkan sumber dan jenis data yang diperlukan, maka ditentukan metode penelitian, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di tengah masyarakat (Tan, dalam Koencaraningrat, 1994).

Peranan Pemuka masyarakat dalam:

1. perencanaan,
2. pengambilan keputusan
3. mobilisasi sumber daya yang ada

yang diambil dari kelompok sasaran merupakan fokus dari penelitian ini.

Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar (Patton, 1980). Sejalan dengan itu Bogdan dan Taylor (1975) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan membuktikan hipotesis.

Pada penelitian ini, pekerjaan menganalisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Setelah data terkumpul dari pengamatan berperan serta, wawancara dan pengumpulan dokumentasi, maka kegiatan berikutnya adalah data diatur, dikelompokkan dan diberi kode. Data kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah. Reduksi data dilakukan bila perlu seterusnya dilakukan pembuatan abstraksi dan interpretasi atau membuat rangkuman.

Tahap berikutnya dalam analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Berkaitan dengan pemeriksaan data, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu.

Moleong (1996) mengatakan ada tiga macam triangulasi:

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi melalui wdan alat yang berbeda. Dalam metode penelitian kualitatif, ini dapat dilakukan dengan: a).membandingkan data hasil

- pengamatan dengan data hasil wawancara, b). membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
2. Triangulasi dengan metode. Ada dua strategi yang bias dilakukan, yaitu; a). pengecekan dengan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama atau b). membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian yang lain.
 3. Triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil analisis dengan tema dan penjelasan lain, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan pikiran logis.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dalam analisis ini akan dibandingkan hasil wawancara dengan pemuka masyarakat dengan pengamatan di lapangan pada pengurus dan anggota P3A.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Di kecamatan Muko-muko Utara, kabupaten Muko-muko, Provinsi Bengkulu terdapat suatu daerah irigasi yang diberi nama dengan Daerah Irigasi (D.I) Air Manjuntio. Pemberian nama daerah irigasi ini disesuaikan dengan nama sungai tempat pengambilan air sebagai sumber air irigasi. Air Manjuntio bermuara ke arah pantai barat pulau Sumatera. Sebagai sumber air untuk irigasi, sungai Air Manjuntio memang cukup potensial. Panjangnya kurang lebih 30 km dengan lebarnya 100 meter. Potensi debit yang ada memberikan daya jangkau pelayanan seluas 16.000 ha. Dengan kata lain irigasi Air Manjuntio memiliki kemampuan untuk melayani kebutuhan air irigasi padi sawah di 38 desa yang terdapat di kecamatan Muko-muko Utara.

Kecamatan Muko-muko Utara, Secara geografis dan administratif, sebelah baratnya berbatasan dengan samudera Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Rejang Lebong. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muko-muko Selatan.

Penduduk kecamatan Muko-muko Utara lebih banyak menetap ke arah pantai barat Pulau Sumatera. Pilihan ini diambil salah satunya adalah karena kemudahan akses transportasi umum masyarakat. Kawasan ini dilalui oleh jalan provinsi, yaitu jalur lintas barat pulau Sumatera. Tidak mengherankan bila di sepanjang jalan provinsi yang melewati kecamatan ini ditemukan deretan rumah penduduk.

Posisi Kecamatan Muko-muko Utara relatif berada ditengah-tengah antara ibu kota provinsi Bengkulu dan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, karena faktor geografis, jalan, waktu tempuh dan sosial budaya, arus barang dan orang lebih memilih antar Muko-muko Utara dengan Padang khususnya Sumatera Barat pada umumnya ketimbang antar Muko-muko Utara dengan Bengkulu.

Muko-muko Utara berbatasan dengan Sumatera Barat hanya karena faktor administrasi pemerintahan. Tidak demikian halnya bilamana perhatian diarahkan pada masalah sosial dan budaya.

Dahulu kala wilayah pengaruh kerajaan Pagar Ruyung, Minang Kabau sampai ke wilayah Muko-muko pada umumnya. Hal ini berpengaruh juga terhadap kehidupan

masyarakat setempat. Nuansa Minang Kabau sangat terasa pada sebagian besar aspek kehidupan masyarakat asli Muko-muko Utara.

Potensi yang dimiliki oleh Muko-muko Utara menimbulkan daya pikat bagi masyarakat luar. Kaum pendatang dan transmigran ingin berpartisipasi dalam pembangunan daerah Muko-muko Utara. Kedatangan "warga baru" ini menambah keragaman etnik, sosial dan budaya masyarakat Muko-muko. Transmigran pada umumnya menempati kawasan yang menjadi wilayah layanan irigasi Air Manjunto.

Daya pikat Muko-muko Utara menjadi meningkat. Pada Tahun 2004 terjadi pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu Utara berubah menjadi dua kabupaten. Salah satunya adalah kabupaten Muko-muko dengan ibu kota kabupatennya di kecamatan Muko-muko Utara. Perubahan status ini menimbulkan terjadinya percepatan pembangunan di Muko-muko Utara, terutama pembangunan fisik. Tentu saja sedikit banyaknya aktivitas ini berimbas ke masyarakat setempat. Nuansa hidup perkotaan yang materialistik berangsur mulai terasa. Arus barang dan orang dari Muko-muko Utara ke daerah lainnya menjadi meningkat.

Irigasi Air Manjunto dibangun pada masa Orde Baru oleh pemerintah pusat pada tahun 1982. Irigasi ini termasuk irigasi besar milik pemerintah dengan tingkatan kelas irigasi teknis.

Daerah layanan irigasi Air Manjunto terbagi menjadi dua bagian, yaitu D.I. Air Manjunto Kanan dan D.I. Air Manjunto Kiri. Daerah irigasi Manjunto kiri mempunyai 76 P3A dimana baru 20 % tergolong P3A aktif. Penetapan P3A aktif atau tidak aktif berdasarkan kepada kriteria yang dibakukan oleh Dinas Impraswil Bengkulu. P3A yang aktif dapat dilihat dari kondisi organisasi dan kemajuan yang dicapai lembaga tersebut. Renah Pematang Gedang dan Jaya Makmur termasuk dalam P3A yang aktif sedangkan Kesma Tirta Mulya dan Memayu Among Tani adalah P3A yang tidak aktif.

Sebelum lembaga P3A diperkenalkan di desa Tanjung Alai, dimana disini terdapat P3A Renah Pematang Gedang dan Kesma Tirta Mulya, sudah dikenal adanya pengaturan dan pengelolaan irigasi yang sifatnya informal sebagai hasil dari kesepakatan diantara pemilik sawah sendiri. Wadah ini disamping dapat berfungsi untuk memperlancar pengaturan air, juga dapat berfungsi sebagai usaha untuk meredam konflik yang mungkin terjadi jika pengaturan air dibiarkan begitu saja.

Berbeda dengan desa Tanjung Alai, desa Tirta Makmur (dimana disini terdapat P3A Jaya Makmur dan Memayu Among Tani) merupakan desa para warga transmigrasi dari Jawa. Mereka pada umumnya melakukan aktivitas sesuai dengan kebiasaan yang mereka bawa dari daerah asal mereka. Walaupun demikian mereka dapat bersosialisasi dengan masyarakat lokal.

Kondisi keempat P3A daerah penelitian dari segi keorganisasian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi P3A daerah penelitian dari segi organisasi

P3A	Eks. Dan pemeliharaan	Iuran (rupiah/ kegiatan)	Struktur Organisasi			
			Kepengurusan Dibentuk oleh	AD/ART	Badan Hukum	Rencana dan kelengkapan adm.
1. Renah P. Gedang	2x tiap msm panen	Rp. 500,-	Anggota	Ada	Tk. Kec	Baik
2. Kesma T. Mulya	1x tiap msm panen	Rp. 500,-	Dari atas	Tdk.Ada	Tk. Kec	Kurang
3. Jaya Makmur	2x tiap msm panen	Rp. 500,-	Anggota	Ada	Tk. Kec	Baik
4. Memayu A. Tani	1x tiap msm panen	Rp. 500,-	Dari atas	Tdk.Ada	Tk. Kec	Kurang

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa baik aktivitas E dan P, AD/ART maupun rencana kerja dan kelengkapan administrasi pada P3A Memayu Among Tani dan Kesma Tirta Mulya tidak memperlihatkan hasil yang baik. Bahkan akhir-akhir ini iuranpun tidak lagi bisa dipungut. Kedua P3A ini merupakan P3A bentukan pemerintah.

Susunan pengurus dari P3A Memayu Among Tani dan Kesma Tirta Mulya dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4). Keberadaan kedua P3A ini seperti dipaksakan di desa ini. Intervensi pemerintah terlihat kuat disini. Di satu desa terdapat dua P3A. Akhirnya, di kedua desa ini terdapat masing-masing dua P3A. Tentu saja dengan adanya dua P3A disatu desa memperbesar jumlah total P3A di daerah irigasi Air Manjuntio ini. Akan tetapi hal ini tidak saja akan menyulitkan aspek pembinaan organisasi, juga masyarakat satu desa akan terbagi menjadi dua bagian untuk satu lembaga yang sama. Persaingan timbul dan kepedulian menjadi berkurang diantara P3A. Hal ini dapat dilihat di desa Tirta Makmur. P3A Jaya Makmur (susunan pengurusnya dapat dilihat pada Tabel 5) dapat dikatakan maju dengan pesat. Berbagai penghargaan mereka peroleh dari berbagai perlombaan yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan pada tahun 2005 ini, mereka

memenangkan perlombaan P3A tingkat Regional dan peringkat keempat ditingkat Nasional. Kemajuan P3A Jaya Makmur seperti tidak berimbas pada P3A sedesanya (Memayu Among Tani).

Tabel 3. Struktur organisasi P3A Memayu Among Tani

No.	Jabatan di P3A	N a m a	Usia (Thn)	Penddk.
1	Ketua	Komarun	48	SMA
2	Wk. Ketua	Bowo	43	SD
3	Sekretaris	Purwanto	45	SMP
4	Bendahara	Aribowo	28	SMP
5	Ulu P3A	-	-	-
6	Ketua Blok I	-	-	-
7	Ketua Blok II	-	-	-

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

Tabel 4. Struktur organisasi P3A Kesma Tirta Mulya

No.	Jabatan di P3A	N a m a	Usia (Thn)	Penddk.
1	Ketua	Iskandar	50	SD
2	Wk. Ketua	Akbar	46	SD
3	Sekretaris	Muslihat	45	SD
4	Bendahara	-	-	-
5	Ulu P3A	Hamzah	47	SD
6	Ketua Blok I	Apri	34	SD
7	Ketua Blok II	Muftahudin	35	SD
8	Ketua Blok III	Dobol	34	SD

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

Tabel 5. Struktur organisasi P3A Jaya Makmur

No.	Jabatan di P3A	N a m a	Usia (Thn)	Penddk.
1	Ketua	Gunadi	51	SMP
2	Wk. Ketua	Mislan	50	SD
3	Sekretaris	Karno	45	SMP
4	Bendahara	Sunyoto	43	SMP
5	Ulu P3A	Sasrosido	51	SD

6	Ketua Blok I	Mislan	43	SMP
7	Ketua Blok II	Tarno	45	SD

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

4.2. Peranan pemuka masyarakat dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi.

Pembentukan P3A merupakan instruksi pemerintah secara vertikal. Makanya, proses tumbuh dan berkembangnya organisasi inipun merupakan hasil pembinaan instansi-instansi terkait, seperti dinas Impraswil dan Pertanian. Terlihat jelas dari keempat P3A yang berada di wilayah ini berstatus irigasi pemerintah ini, juru dan pengamat pengairan sebagai perpanjangan tangan pemerintah terlibat sangat dalam proses pembentukan P3A ini. Juga, dalam hal penyusunan pengurus P3A. Langkah ini disatu sisi mungkin dapat dimaklumi. Pemerintah ingin programnya berhasil. Pemerintah telah menghabiskan banyak dana untuk membangun sistem irigasi. Akan tetapi keberfungsian lembaga justeru terlihat pada P3A yang pembentukannya mempertimbangkan aspek sosial dan kemasyarakatan setempat. Pembentukan pengurus dan keterlibatan pemuka masyarakat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pembentukan kepengurusan dan keterlibatan pemuka masyarakat

P3A	Dibentuk	Yang terlibat	Personil pengurus	Pergantian pengurus	keberfungsian
1. Renah P. Gedang	1989	- Perangkat desa - Pemuka masyarakat - Juru & pengamat pengairan - Petani	Lama (sebelum ada P3A)	Belum Pernah	Baik
2. Kesma T. Mulya	1990	- Perangkat desa - Juru & pengamat pengairan	Baru	Belum pernah	Tidak*
3. Jaya Makmur	1990	- Perangkat desa - Pemuka masyarakat - Juru & pengamat pengairan - Petani	Baru	Belum pernah	Baik
4. Memayu A. Tani	1991	- Perangkat desa - Juru & pengamat pengairan	Baru	Belum pernah	Tidak

Sumber: Dinas Impraswil Muko-muko (2005)

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa pada P3A Renah P. Gedang dan Jaya Makmur dapat berfungsi dengan baik, walaupun keduanya berbeda dalam hal personil pengurus.

Azas musyawarah untuk mufakat terlihat pada aspek perencanaan dalam hal ini pembentukan pengurus. Seluruh komponen masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan termasuk pemuka masyarakat sebagai tokoh informal di pedesaan. Kehadiran mereka pada tahap perencanaan pembentukan pengurus dapat menjadi “lokomotif “ peran serta masyarakat secara umum. Kehadiran mereka dapat sebagai penyeimbang dari keinginan pihak pemerintah yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kehadiran dan suara mereka dapat juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Suprihadi dan Soehartono (1984) mengatakan bahwa pemuka masyarakat sebagai bagian dari pemimpin desa merupakan pemimpin yang memiliki kelebihan-kelebihan dari masyarakat umum. Mereka memiliki keahlian di bidang tertentu, dekat dengan masyarakat kecil, mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan berfikir lebih, mendahului masyarakatnya.

Dalam aspek pengambilan keputusan dan mobilisasi massa, pemuka masyarakat di kedua di kedua P3A ini (Tabel 7 dan Tabel 8) tetap berperan sesuai dengan kapasitasnya. Hasilnya keputusanpun dapat mermuaskan berbagai pihak. Massa pun dapat dikerahkan untuk aktivitas P3A. Berbeda dengan P3A bentukan pemerintah, pemuka masyarakat yang ada disini (Tabel 9 dan Tabel 10) tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.

Tabel 7. Pemuka Masyarakat di P3A Jaya Makmur, desa Tirta makmur

No.	N a m a	Usia (Thn)	Pekerjan
1	Gunawan	45	Guru/Mubalig
2	Mustaji	48	Tani
3	Sunyoto	50	Tani
4	Mularoji	46	Tani
5	Gimin	50	Tani & Swasta
6	Jarwoto	50	Tani & Swasta
7	Riyanto	39	Babinsa/TNI

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

Tabel 8. Pemuka masyarakat di P3A Renah Pematang Gedang, Desa Tanjung Alai

No.	N a m a	Usia (Thn)	Pekerjan
1	Dalit	50	Swasta
2	Janar	46	Tani
3	Buyung Alus	45	Tani
4	Azhar	49	Tani

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

Tabel 9. Pemuka masyarakat di P3A Memayu Among Tani, Desa Tirta Makmur

No.	N a m a	Usia	Pekerjan
1	Kasno	50	Tani
2	Bowo	43	Tani
3	Ngadiman	47	Tani
4	Rofni	42	Guru SD
5	M. Toha	47	Guru Diniyah

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

Tabel 10. Pemuka masyarakat di P3A Kesma Tirta Mulya, desa Tanjung Alai

No.	N a m a	Usia	Pekerjan
1	Kilaf	38	Tani
2	Sumardi	39	Tani
3	Sam	40	Tani
4	Maso	45	Tani

Pemuka Masyarakat di kedua P3A bentukan pemerintah terutama di P3A Memayu Among Tani, walau tidak dilibatkan dalam aspek perencanaan merasa bahwa mereka tetap melibatkan diri dalam aspek lain dalam mendorong anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi. Hal ini dibenarkan oleh ketua kelompok P3A Memayu Among Tani, Komarun. Komarun dan Busra SPd (Mantan KUA setempat) mengatakan sumber permasalahan sebetulnya adalah pada aspek teknis dari jaringan irigasi sehingga air tidak sampai ke petak sawah warga. Masalah ini sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai pertemuan, akan tetapi solusi yang memadai tidak kunjung didapat. Akhirnya penguruspun tidak kompak. Status P3A ini tetap sebagai P3A tidak aktif, tidak “naik

kelas". Ditengah ketidakpastian berusaha tani padi sawah berkaitan dengan ketersediaan air, "wabah" budidaya kelapa sawit melanda daerah Muko-muko. Aspek agribisnis ditambah dengan kelangkaan serta mahalnya harga saprodi berkontribusi terhadap berubahnya lahan padi sawah menjadi kebun sawit di daerah irigasi Air manjunto. Komarun mengatakan hampir seluruhnya anggota P3A Memayu Among Tani beralih bertanam kelapa sawit di lahan sawah mereka. Secara kasat mata sebetulnya hamparan kebun sawit akan terlihat di kecamatan Muko-muko Utara yang menjadi daerah irigasi. Walau masyarakat sadar bahwa yang mereka lakukan melanggar aturan pemanfaatan sawah beririgasi, tetapi sejauh ini sangsi belum pernah dijatuhkan oleh pemerintah. Busra SPd (Mantan KUA dan tokoh masyarakat setempat) mengatakan pada saat ini atau akan datang sangat sulit mengembalikan kebun sawit menjadi lahan padi sawah. Bahkan justeru lahan padi sawahnya yang terus berkurang. Ia juga menyadari ini merugikan pemerintah dan membahayakan ketahanan pangan nasional. Namun , lebih lanjut dia mengatakan, pemuka masyarakat sebatas memberikan masukan, keputusan akhir tetap di tangan warga.

Efektivitas dari peran pemuka masyarakat dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi sangat tergantung dari komponen-komponen lain yang menyusun system irigasi, terutama aspek teknis irigasi dan faktor-faktor lainnya, seperti agribisnis.

Hebatnya wabah kebun sawit ini juga melanda P3A Jaya Makmur. Dua orang anggotanya beralih berkebun sawit ketimbang budidaya padi sawah. Pada hal, Gunadi (ketua P3A), mengatakan air irigasi yang sampai ke daerahnya cukup bahkan berlebih untuk memenuhi kebutuhan air padi sawah mereka.

4.3. Kelompok pemuka masyarakat yang paling pas untuk mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi.

Masyarakat desa Tirta Makmur merupakan masyarakat pendatang. Mereka adalah warga transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa. Merekapun menenpatkan beberapa orang warganya sebagai pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat dengan latar belakang pekerjaanya di P3A Jaya Makmur, desa Tirta Makmur dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Pemuka masyarakat P3A Jaya Makmur dan latar belakang pekerjaannya

No.	N a m a	Usia (Thn)	Pekerjan
1	Gunawan	45	Guru/Mubalig
2	Mustaji	48	Tani
3	Sunyoto	50	Tani
4	Mularoji	46	Tani
5	Gimin	50	Tani & Swasta
6	Jarwoto	50	Tani & Swasta
7	Riyanto	39	Babinsa/TNI

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa pemuka masyarakat yang ada di P3A Jaya Makmur berasal dari latar belakang kelompok atau pekerjaan yang berbeda. Latar belakang pekerjaan tani lebih mendominasi. Gimin dan Jarwoto awalnya memang adalah petani biasa. Akan tetapi dalam perjalanannya mereka mampu mengembangkan naluri bisnisnya. Keduanya memasuki dunia swasta dan memiliki pendapatan yang berbeda dengan yang lain. Mereka sukses. Dominasi dalam bidang ekonomi menjadikan mereka banyak bersentuhan dengan masyarakat banyak. Gimin, misalnya, usahanya bergerak dalam bidang sarana produksi (saprodi). Masyarakat sering berurusan dengan usaha yang dijalankan Gimin ini. Gimin memberi kemudahan pada konsumennya. Pembayaran barang yang telah diambil dapat dilakukan setelah panen.

Mengadopsi pengelompokan yang dilakukan oleh Abdul Kappi (1988), maka Jarwoto dan Gimin termasuk dalam kelompok elite ekonomi, Gunawan adalah elite agama, Mustaji, Sanyoto dan Mularoji adalah elite cendekiawan dan Riyanto adalah elite birokrasi.

Secara kuantitatif kelompok elite agama dan elite birokrasi terlihat sedikit. Akan tetapi pengaruhnya tidaklah sesedikit jumlahnya. Riyanto, misalnya, sangat berperan dalam mobilisasi massa terutama dalam kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan mengikuti pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pembangunan desa pada umumnya. Demikian juga halnya dengan Gunawan.(elite agama), dalam ceramah agamanya sering memasukkan aspek sosial kemasyarakatan. Hampir disetiap kesempatan

tokoh ini menekankan pentingnya arti kebersamaan dalam mencapai cita-cita bersama dengan nuansa islami.

Aktivitas dan peran yang dilakukan pemuka masyarakat P3A Jaya Makmur desa Jaya Makmur ini dibenarkan oleh seluruh pengurus P3A ini. Pengurus merasa sangat terbantu dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat kepada mereka. Berbagai program kerja lembaga dapat berjalan dengan lancar. Cita-cita lembaga juga dapat terwujud berkat peran pemuka masyarakat untuk mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi. Bahkan pengurus tidak perlu repot-repot mengumpulkan warga untuk berbagai keperluan apabila pemuka masyarakat sudah hadir ditempat yang diinginkan apapun latar belakang pekerjaannya..

Masing-masing kelompok elite yang ada dapat menjalankan perannya dengan baik. Tidak ada yang dominan. Tidak ada kekhususan dalam lingkungan masyarakat desa ini. Letak geografis, administratif, dan dilalui jalur lintas barat Sumatera serta pola hidup materialis di kecamatan Muko-muko umumnya memperkecil ruang terciptanya lingkungan masyarakat khusus. Sumuntarsih dkk. (1992) mengatakan di dalam masyarakat Indonesia terdapat lingkungan masyarakat yang khusus. Misalnya, ada kelompok masyarakat yang taat sekali beragama. Dari kelompok ini akan muncul pemuka masyarakat yang dominan dari kelompok elite agama. Contoh lain, masyarakat feodal, dari sini akan muncul pemuka masyarakat yang dominan dari kelompok elite ekonomi atau bangsawan.

4.4. Hubungan antara luasan kepemilikan lahan padi sawah pemuka masyarakat dengan peranan mereka dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi.

Masyarakat tani anggota P3A Jaya Makmur dan Memayu Among Tani desa Tirta makmur adalah pendatang. Mereka merupakan warga transmigrasi asal Jawa. Sebagai transmigran, mereka mendapat lahan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian tidak terdapat kepemilikan sawah yang besarnya menonjol diantara mereka. Demikian juga halnya dengan pemilikan lahan padi sawah pemuka masyarakatnya. Luas sawah pemuka masyarakat desa Tirta Makmur dapat dilihat pada Tabel 12 .

12. Luas sawah Pemuka masyarakat di P3A Jaya Makmur

No.	N a m a	Usia	Luas sawah (ha)	pekerjaan
1	Gunawan	45	0,5	Guru/Mubalig
2	Mustaji	48	1,4	Tani
3	Sunyoto	50	1,5	Tani
4	Mularoji	46	1,2	Tani
5	Gimin	50	1,5	Tani/Swasta
6	Jarwoto	50	1,0	Tani/Swasta
7	Riyanto	39	0,0	Babinsa/TNI

Sumber: Diolah dari data lapangan (2005)

Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa kepemilikan sawah pemuka masyarakat P3A Jaya Makmur tidak ada yang lebih besar dari 1,5 Ha. Dengan demikian anggapan umum yang mengatakan bahwa keberperanan pemuka masyarakat untuk mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi berkaitan luasan sawah mereka yang besar tidak sepenuhnya benar. Disisi lain, kalau berpedoman kepada luasan sawah semestinya Riyanto (39 tahun) dengan sawahnya yang 0,0 Ha tidaklah perlu melibatkan diri terlalu jauh dalam hal pengelolaan air irigasi. Riyanto dapat memperhatikan hal lain yang lebih menguntungkan. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Riyanto berperan aktif ditengah masyarakat.

Para Pemuka Masyarakat ini pada umumnya mengatakan bahwa keberperanan mereka lebih banyak ditentukan karena ikatan emosional dengan warga. Warga dan pengurus P3A dapat menempatkan mereka pada posisi yang sepantasnya sesuai dengan kedudukan mereka.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan pemuka masyarakat dapat mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi.
2. Efektivitas dari peran pemuka masyarakat menjadi optimal apabila bilamana komponen lain yang menyusun sistem irigasi terutama aspek teknis irigasi bisa bekerja dengan baik.
3. Tidak ditemukan kelompok pemuka masyarakat tertentu yang dominan dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi.
4. Tidak ditemukan hubungan antara luasan pemilikan lahan sawah pemuka masyarakat dengan peranan mereka dalam mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi.

6.2. Saran.

Dari temuan dan kesimpulan yang ditetapkan dapat disarankan bahwanya pemuka masyarakat local perlu mendapat perhatian dalam upaya mendorong partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan air irigasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kappi (1988). "Kelompok elite di Pedesaan" dalam kelompok elite dan hubungan sosial di pedesaan. Yayasan ilmu-ilmu social, Jakarta.
- Achmadi, P. (1986). Teknik tanah dan air. Direktorat Pengairan Pedesaan. IPB, Bogor.
- Agustin, Z. Karnaen, E. Daud dan E. Pasandaran (1992). Sistem irigasi masyarakat Pedesaan (Studi kasus desa Ciburuy, Jawa Barat). Dalam Irigasi di Indonesia "Dinamika kelembagaan petani".
- Ambler (1991). Dinamika Irigasi: Kerangka dan prinsip-prinsip kelembagan. LP3ES, Jakarta.
- Bogdan, Robert dan Taylor, S.J. (1992). Introduction in quantitative research; Aphemological approach at the social science (terjemahan). Usaha Nasional, Surabaya.
- Buddy Prasadja (1982). Pembangunan desa dan masalah kepemimpinannya. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- David Berry (1983). Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi. *Diterjemahkan* oleh Tim Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosiologi (LPPS) Jakarta. C.V. Rajawali, Jakarta.
- Diana Convers (1984). Perencanaan sosial di dunia ketiga (Suatu pengantar). *Diterjemahkan* oleh Susetiawan (1992). Gadjah Mada University Press.
- F. Janssen (1983). "Inventarisasi golongan-golongan, kelompok-kelompok dan orang-orang terkemuka", dalam sosiologi pedesaan, Editor; Sajagyo dan P. Sajagyo. Gadjah Mada University Press.
- Helmi (1992). Aspek-aspek kelembagaan dalam keberlanjutan (sustainability) sistem irigasi. Fokus Perhatian. Irigasi Indonesia. Fisi No. 8, Padang.
- Keith David dan John W. Newstrom (1993). Perilaku dalam organisasi. *Diterjemahkan* oleh Agus Dharma. Erlangga, Jakarta.
- Koentjaraningrat (1994). Metode-metode penelitian masyarakat. Gramedia, Jakarta.
- Meizul Zuki (1993). Upaya perbaikan kinerja sistem irigasi dalam menunjang program Supra Insus. Laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- M. Supriyadi S. dan M. Suhartono S. (1984). Desa kita (Sosiologi Pedesaan). Penerbit Alumni, Bandung.

- Moleong, L.J. (1996). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, N. (1991). Kepemimpinan adopsi inovasi untuk pembangunan masyarakat. Rake, Press. Yogyakarta.
- Pasandaran, E. (1991). "Tinjauan tentang sistem irigasi di Indonesia", dalam Irigasi di Indonesia: Strategi dan pengembangan. Editor; Efendi Pasandaran.
- Patton M. Q. (1980). Quantitative evaluation methods. Beverly Hills, Sage Publication.
- Pusposutardjo, S. (1989). Analisis tinjau potensi irigasi Indonesia untuk mendukung Swasembada beras. Makalah disampaikan pada seminar dan kongres PERTETA Indonesia di Malang.
- Stephen P. Robbins (1996). Perilaku organisasi: Konsep, kontroversi dan aplikasi. Terjemahan. P.T Prenhallindo, Jakarta.
- T. Sondakh, Goni M., Ma'ruf T. dan S. Dengo (1993). Peranan LKMD dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pemeliharaan lingkungan hidup di Kab. Gorontalo dan Bolang Mongondouw, Sulawesi Utara. Laporan Penelitian.
- Sumintarsih, H.J. Wibowo dan Isni Herawati (1992). Sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan D.I. Yogyakarta. Dept. Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yusril Dany (2000). Peranan P3A mengelola air irigasi untuk keperluan tanaman dalam usaha meningkatkan hasil pertanian (Studi kasus di D.I. Air Manjuntou, Bengkulu Utara). Tesis magister dalam bidang Pembangunan Wilayah Pedesaan).